



Bank Syariah
Bangka Belitung
Bank Persekonomian Rakyat Syariah



RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUT TAHUN 2026

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BABEL



KANTOR PUSAT & KPO

Ruko TJ Tower No. 21-22 Jl. Kampung Melayu Bukit Merapin
Gerunggang, Pangkalpinang 33123
Tlp. (0717) 9103567

 www.bprsbabel.id

  [bprsbangkabelitung](https://www.instagram.com/bprsbangkabelitung)

9 Desember 2025

Nomor : 830/BSB/Dir/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Tahun 2026

Kepada Yth.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di Pangkalpinang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, maka perkenankan Kami menyampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2026, sebagaimana terlampir.

Demikian, Atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPRS Bangka Belitung
Kantor Pusat


CHAIRUL ICHWAN
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2026

PT. BPRS BANGKA BELITUNG

Direksi,

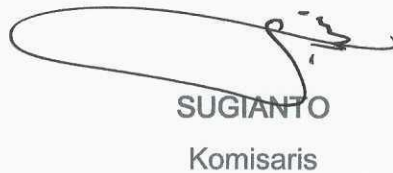


CHAIRUL ICHWAN
Direktur Utama



HENDRA DHARMA
Direktur

Disetujui Oleh,



SUGIANTO
Komisaris

Mengetahui,
Dewan Pengawas Syariah



SYAIPUL ZOHRI
Ketua



HASYIM SYAHRANI
Anggota

DAFTAR ISI

BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. PENCAPAIAN RENCANA AKSI BERKELANJUTAN TAHUN 2025.....	1
B. VISI DAN MISI	2
C. TUJUAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	3
D. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DALAM RENCANA AKSI BERKELANJUTAN.....	4
E. ALOKASI SUMBER DAYA.....	10
F. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN RAKB	10
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	12
A. DASAR DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN	12
B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.....	13
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	17
A. RENCANA STRATEGIS BISNIS.....	17
B. KAPASITAS ORGANISASI	17
C. KONDISI KEUANGAN DAN KAPASITAS TEKNIS	18
D. KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL	18
E. STRATEGI KOMUNIKASI.....	19
F. SISTEM MONITORING, EVALUASI, DAN MITIGASI.....	19
G. KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	20
H. PENDEKATAN ANALISIS FAKTOR PENENTU	20
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	22
A. DASAR PEMIKIRIAN	22
B. KEGIATAN	22
C. SUMBER DAYA.....	24
D. SISTEM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM.....	25
E. TANTANGAN DAN RENCANA KE DEPAN	25
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	27
A. TUJUAN TINDAK LANJUT	27
B. MEKANISME PELAPORAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT	27
C. ARAH PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG	28
BAB VI PENUTUP	29
A. KESIMPULAN UMUM.....	29
B. KOMITMEN PELAKSANAAN.....	29
C. PENUTUP	30

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. PENCAPAIAN RENCANA AKSI BERKELANJUTAN TAHUN 2025 -

Selama periode pelaksanaan RAKB sebelumnya, BPRS Bangka Belitung telah menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dengan sejumlah capaian sebagai berikut :

1. Aspek Produk Penghimpunan Dana

Hingga Triwulan ke-3 tahun 2025, BPRS Bangka Belitung telah menghimpun dana masyarakat yang berkelanjutan pada produk tabungan dan deposito (investasi berjangka):

- a. Tabungan sebanyak 2328 Account dengan total Rp 7.065.061.169,-
- b. Deposito Mudharabah sebanyak 252 Account dengan total Rp 36.101.500.000,-

Dari produk penghimpunan dana diatas Portofolio penghimpunan dana berkelanjutan per September 2025 (Triwulan ke-3 tahun 2025) adalah sebesar Rp 315.333.940.579,-

2. Aspek Produk Penyaluran Dana

Hingga Triwulan ke-3 tahun 2025, BPRS Bangka Belitung telah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan sektor ekonomi produktif dengan orientasi sosial dan lingkungan sebanyak 768 Nasabah dan portofolio pembiayaan berkelanjutan per September 2025 adalah sebesar Rp 35.369.940.264,-

3. Aspek Operasional Hijau

Penerapan kebijakan paperless dan digitalisasi layanan telah menurunkan penggunaan kertas hingga 6.83% per Oktober 2025 atau Rp 4.123.800,- dibanding dengan tahun 2024 dan mengurangi konsumsi listrik di kantor

4. Aspek Literasi Keuangan

Melaksanakan program edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dengan total peserta lebih dari 450 orang

5. Aspek Tata Kelola

- a. Terbentuk Tim Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari Direksi dan Seluruh Pejabat Eksekutif yang berfungsi mengoordinasikan seluruh kegiatan RAKB dan pelaporan kepada OJK
- b. Ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat untuk Direksi dan Dewan Komisaris
- c. Ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
- d. Ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS.

Capaian tersebut menjadi fondasi untuk meningkatkan integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPRS Bangka Belitung pada periode berikutnya.

B. VISI DAN MISI

Visi Utama :

Terwujudnya Bank Daerah Dambaan Masyarakat Negeri Serumpun Sebalai yang terpercaya, sehat dan menguntungkan

Visi dalam rencana berkelanjutan :

Menjadi Bank Syariah Daerah yang terpercaya dan tumbuh berkelanjutan dengan menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk kemaslahatan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai.

Misi Utama :

1. Menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka turut serta berperan menuju masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju, mandiri, dan sejahtera
2. Menyebarluaskan nilai-nilai islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha
3. Meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh kantor

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Insanai menuju tenaga kerja yang professional
5. Meningkatkan kerja sama dan bersinergi dengan pihak lain

Misi dalam rencana berkelanjutan :

Dalam rangka mendukung visi keuangan berkelanjutan dan selaras dengan misi BPRS Bangka Belitung secara umum, maka misi keuangan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan pelaku UMKM secara inklusif dan berkeadilan, melalui pembiayaan produktif yang ramah lingkungan dan berdampak sosial positif bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan produk dan layanan berkelanjutan, dengan menanamkan prinsip rahmatan lil 'alamin dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional Bank.
3. Meningkatkan kualitas layanan berorientasi keberlanjutan, dengan memperhatikan efisiensi energi, pengurangan limbah, serta pelayanan digital yang ramah lingkungan dan mudah diakses oleh masyarakat
4. Mengembangkan kapasitas dan kesadaran SDI terhadap prinsip keuangan berkelanjutan, melalui pelatihan, edukasi, dan internalisasi nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam budaya kerja Bank.
5. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat, untuk mendorong ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. TUJUAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sebagai penjabaran dari visi dan misi keuangan berkelanjutan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BPRS Bangka Belitung bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan, melalui penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor-sektor yang

berdampak sosial positif, terutama bagi pelaku UMKM, usaha mikro, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek kegiatan usaha Bank, termasuk dalam kebijakan, proses bisnis, manajemen risiko, serta produk dan layanan yang ramah sosial dan lingkungan.
3. Mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang berkelanjutan, baik di sisi penghimpunan maupun penyaluran dana, yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan beretika.
4. Membangun kapasitas internal dan budaya kerja yang berorientasi pada keberlanjutan, dengan meningkatkan kompetensi pegawai serta memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.
5. Memperkuat kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga keuangan lain, dalam memperluas jangkauan dan dampak keuangan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Mewujudkan keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) sesuai prinsip syariah, guna menciptakan nilai berkelanjutan bagi nasabah, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan.

D. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DALAM RENCANA AKSI BERKELANJUTAN

1. Rencana satu tahun

Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Januari – Juni 2026	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
	Penyusunan Kebijakan mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.



Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya PE yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
Juli – Desember 2026	Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan
	Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik	Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah yaitu pembiayaan sepeda dalam rangka menggeser penggunaan Sepeda Motor dengan bahan bakar fosil ke Listrik.	Terdapat portofolio kredit minimal Rp. 50 juta untuk pembiayaan sepeda dan sepeda motor listrik
	Efisiensi Penggunaan Listrik	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025.



Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
	Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2025.

2. Rencana lima tahun

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2026	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan Peningkatan awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.
	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar
	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Pejabat Eksekutif yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
	Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2025



Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<p>Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green.</p> <p>Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.</p> <p>Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik sebagai bentuk Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menggeser penggunaan Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik.</p>	<p>Penghematan penggunaan kertas sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2026.</p> <p>Penurunan penggunaan air minum kemasan dibandingkan dengan tahun 2026</p> <p>Terdapat portofolio pembiayaan minimal sebesar Rp. 30 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik pada tahun 2026</p>
2027	<p>Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi</p> <p>Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green.</p> <p>Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.</p> <p>Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik sebagai bentuk Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung</p>	<p>Penghematan biaya listrik sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2027</p> <p>Penghematan penggunaan kertas sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2027.</p> <p>Penurunan penggunaan air minum kemasan dibandingkan dengan tahun 2027</p> <p>Terdapat peningkatan portofolio pembiayaan minimal sebesar Rp. 30 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik pada tahun 2027</p>



Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	program pemerintah dalam rangka menggeser penggunaan Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik	
2028	<p>Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi</p> <p>Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green.</p> <p>Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.</p> <p>Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik sebagai bentuk Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menggeser penggunaan Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik</p>	<p>Penghematan biaya listrik sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2028</p> <p>Penghematan penggunaan kertas sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2028</p> <p>Penurunan penggunaan air minum kemasan dibandingkan dengan tahun 2028</p> <p>Terdapat peningkatan portofolio pembiayaan minimal sebesar Rp. 30 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik pada tahun 2028</p>
2029	<p>Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi</p> <p>Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green.</p>	<p>Penghematan biaya listrik sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2029</p> <p>Penghematan penggunaan kertas sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2029</p>



Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<p>Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.</p> <p>Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik sebagai bentuk Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menggeser penggunaan Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik</p>	<p>Penurunan penggunaan air minum kemasan dibandingkan dengan tahun 2029</p> <p>Terdapat peningkatan portofolio pembiayaan minimal sebesar Rp. 30 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik pada tahun 2029</p>
2030	<p>Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi</p> <p>Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green.</p> <p>Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.</p> <p>Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik sebagai bentuk Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menggeser penggunaan Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik</p>	<p>Penghematan biaya listrik sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2030</p> <p>Penghematan penggunaan kertas sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2030</p> <p>Penurunan penggunaan air minum kemasan dibandingkan dengan tahun 2030</p> <p>Terdapat peningkatan portofolio pembiayaan minimal sebesar Rp. 30 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik pada tahun 2030</p>



E. ALOKASI SUMBER DAYA

Pelaksanaan RAKB akan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya internal BPRS Bangka Belitung, dengan rincian:

1. Anggaran

Dialokasikan dari biaya operasional sebesar Rp 562.391.889,- dan dukungan dana sosial (baitul maal) BPRS Bangka Belitung

2. Sumber Daya Manusia

Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan kerja Audit, Divisi Operasional, Divisi Marketing, Divisi SDI & Personalia, Satuan Kerja IT.

3. Sarana dan Infrastruktur

Pemanfaatan sistem IT, fasilitas kantor, dan jaringan kerja sama dengan lembaga sosial/mitra strategis.

BPRS Bangka Belitung akan memastikan bahwa pengalokasian sumber daya sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

F. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN RAKB

Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di BPRS Bangka Belitung dilaksanakan secara terintegrasi dalam struktur organisasi dengan memperhatikan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing unit kerja. Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh rencana dan inisiatif keuangan berkelanjutan terlaksana secara efektif, terukur, dan sejalan dengan strategi bisnis serta prinsip syariah.

Secara lebih rinci, Direktur Utama bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keseluruhan RAKB dan memastikan penyelarasan dengan visi, misi, serta strategi bisnis bank. Sementara itu, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko bertugas memastikan seluruh kegiatan dalam RAKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, serta prinsip kehati-hatian.



Unit-unit terkait lainnya memiliki peran sebagai berikut :

1. Divisi Marketing

Memastikan penyaluran pembiayaan berkelanjutan diterapkan pada produk yang berdampak sosial dan lingkungan positif.

2. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Memastikan penyusunan pedoman perusahaan, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, serta monitoring Risiko Bank

3. Divisi SDI dan Personalia

Mengelola program internal seperti peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan pegawai.

4. Satuan Kerja Audit Internal

Memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kebijakan, serta melakukan evaluasi berkala atas efektivitas RAKB.

5. Divisi Operasional

Mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan - kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan melaksanakan efisiensi kegiatan operasional, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah operasional.

Dengan struktur penanggung jawab yang jelas dan terintegrasi ini, diharapkan implementasi RAKB di BPRS Bangka Belitung dapat berjalan secara berkesinambungan, terukur, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. DASAR DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN

Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BPRS Bangka Belitung dilakukan mengacu pada ketentuan :

1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - a. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
 - b. POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - c. POJK No. 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS
 - d. POJK No. 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
3. Kebijakan Internal BPRS
 - a. SK Direksi No. 30/SK-Dir/BSB.02/IX/2025 tentang SOP Pembiayaan
 - b. SK Direksi No. 604/SK-Dir/BSB/VII/2020 tentang Penetapan Penggunaan Dana Baitul Maal
 - c. SK Direksi No. 017/SK-Dir/BSB.02/IX/2023 tentang SOP Penghimpunan Dana
4. Konteks eksternal, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan sektor UMKM, dan isu lingkungan di wilayah operasional
5. Kesesuaian dengan prinsip syariah, yang menekankan keseimbangan antara keuntungan (profit), kebermanfaatan sosial (people), dan kelestarian lingkungan (planet).

Pendekatan penyusunan RAKB dilakukan secara partisipatif dan bertahap, melibatkan seluruh unsur organisasi agar implementasinya dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai unit kerja yang memiliki peran strategis, baik dalam perumusan kebijakan, pengumpulan data, analisis program, maupun pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Keterlibatan lintas fungsi ini dimaksudkan agar RAKB yang dihasilkan bersifat komprehensif, realistis, dan sejalan dengan strategi bisnis serta prinsip syariah.

1. Direksi

Direksi memegang peran utama dalam memimpin proses penyusunan RAKB.

- a. Direktur Utama bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis, menyetujui prioritas program keuangan berkelanjutan, serta memastikan bahwa seluruh rencana aksi mendukung visi dan misi BPRS Bangka Belitung
- b. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko memastikan bahwa rancangan RAKB mematuhi ketentuan regulator, sejalan dengan prinsip kehati-hatian, serta mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan dan proses bisnis bank.

2. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam tahap penyusunan, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan dan pengawasan atas kebijakan serta rencana strategis yang diusulkan oleh Direksi, termasuk memberikan masukan terhadap kesesuaian antara RAKB dan arah pengembangan usaha bank.

Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa seluruh program dalam RAKB sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam aspek pembiayaan, investasi, maupun kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan BPRS.

3. Divisi Marketing

Divisi Marketing memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi peluang bisnis dan sektor pembiayaan yang mendukung prinsip keuangan berkelanjutan.

Tanggung jawabnya meliputi :

- a. Menyusun rencana pengembangan produk dan layanan pembiayaan yang ramah lingkungan, berorientasi sosial, dan sesuai prinsip syariah.



- b. Mengidentifikasi segmen pasar potensial untuk pembiayaan berkelanjutan, seperti sektor pertanian organik, energi terbarukan, pendidikan, dan UMKM inklusif.
 - c. Mengembangkan strategi komunikasi dan edukasi kepada nasabah serta masyarakat mengenai produk keuangan berkelanjutan.
 - d. Memberikan masukan terhadap arah strategis RAKB berdasarkan tren pasar dan kebutuhan masyarakat.

4. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Satker ini berperan sebagai penjaga keseimbangan antara pelaksanaan program keuangan berkelanjutan dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
Tugasnya antara lain :
 - a. Memastikan setiap kegiatan dan program dalam RAKB sejalan dengan ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 serta prinsip syariah.
 - b. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance Risk/ESG Risk) yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan berkelanjutan.
 - c. Menyusun pedoman mitigasi risiko serta indikator pemantauan kinerja pelaksanaan RAKB.
 - d. Mengawal kepatuhan proses penyusunan RAKB terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal yang berlaku.

5. Divisi SDI & Personalia
Divisi SDI & Personalia bertanggung jawab dalam penguatan kapasitas internal untuk mendukung implementasi RAKB secara berkelanjutan.
Perannya mencakup :
 - a. Mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam budaya kerja dan kebijakan SDM BPRS.
 - b. Menyusun program pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait prinsip keuangan berkelanjutan, ESG, dan efisiensi energi.
 - c. Mendorong kegiatan internal yang mendukung tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja BPRS
 - d. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam analisis dan implementasi pembiayaan berkelanjutan.



6. Divisi Operasional

Divisi Operasional memiliki peran penting dalam mendukung aspek efisiensi, keberlanjutan, dan tata kelola dalam aktivitas harian bank.

Tugasnya meliputi:

- a. Mengimplementasikan praktik operasional ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, digitalisasi proses administrasi, dan pengurangan penggunaan kertas (paperless banking).
- b. Menyusun prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan RAKB agar terintegrasi dengan kegiatan operasional BPRS.
- c. Memastikan kelancaran proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan aktivitas keuangan berkelanjutan.
- d. Mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem operasional yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis bank.

7. Satuan Kerja Audit Internal

Satker Audit Internal berperan sebagai third line of defense untuk memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan RAKB dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.

Perannya antara lain:

- a. Melakukan rewiuw atas proses penyusunan RAKB guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan pedoman internal bank.
- b. Memberikan masukan terkait efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.
- c. Melakukan evaluasi dan audit berkala terhadap implementasi RAKB, termasuk pencapaian target dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- d. Melaporkan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk penyempurnaan berkelanjutan.

8. Satuan Kerja IT

Satker IT memiliki peran sebagai pendukung utama dalam aspek digitalisasi dan infrastruktur sistem informasi RAKB.

Tugasnya meliputi:



- a. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang dapat mencatat, memantau, dan melaporkan program-program keuangan berkelanjutan secara efisien.
- b. Mendukung penerapan teknologi yang ramah lingkungan seperti penggunaan cloud system, paperless system, dan optimalisasi platform digital untuk layanan nasabah.
- c. Menyediakan data dan analisis berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan evaluasi RAKB.
- d. Menjamin keamanan data dan keberlangsungan layanan TI agar pelaksanaan RAKB dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Selain pihak internal, BPRS juga dapat berkoordinasi dengan:

1. Pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
2. Lembaga mitra syariah dan komunitas UMKM dalam pembiayaan mikro dan pelatihan wirausaha berkelanjutan.

Proses penyusunan RAKB BPRS Bangka Belitung dilaksanakan secara terstruktur, partisipatif, dan sesuai prinsip syariah, guna memastikan bahwa arah kebijakan dan program keuangan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara efektif dan terukur. Tahapan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola (governance) dan komitmen BPRS terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. RENCANA STRATEGIS BISNIS

Rencana Strategis Bisnis BPRS Bangka Belitung yang telah ada menjadi acuan utama dalam menentukan arah dan prioritas RAKB tahun 2026 yang memuat strategi pertumbuhan pembiayaan yang sehat, penguatan penghimpunan dana masyarakat, dan pengembangan SDI yang kompeten.

Dalam konteks keuangan berkelanjutan, strategi bisnis yang telah ada diarahkan untuk :

1. Memperluas pembiayaan produktif kepada sektor UMKM dan ekonomi mikro yang memiliki dampak sosial positif.
2. Mendorong inovasi produk tabungan dan pembiayaan dengan nilai keberlanjutan (seperti pembiayaan ramah lingkungan, SimPel, dan tabungan sosial).
3. Mengintegrasikan prinsip syariah dan triple bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan) ke dalam target bisnis tahunan.

B. KAPASITAS ORGANISASI

Struktur organisasi BPRS Bangka Belitung saat ini telah memiliki unit-unit kunci yang mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain :

1. Divisi Marketing → bertanggung jawab pada pengembangan produk dan perluasan jangkauan pembiayaan produktif bagi masyarakat.
2. Satker Kepatuhan dan Manajemen Risiko → berperan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis mempertimbangkan risiko sosial dan lingkungan.
3. Divisi SDI & Personalia → mendukung penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pembinaan kompetensi terkait keberlanjutan.
4. Satker IT dan Operasional → berperan dalam mendukung efisiensi energi dan digitalisasi layanan untuk mengurangi dampak lingkungan.
5. Satker Audit Internal (SKAI) → memberikan fungsi assurance independen terhadap efektivitas pelaksanaan RAKB.

Meskipun struktur organisasi sudah memadai, perlu peningkatan kapasitas SDI dalam hal pemahaman konsep sustainable finance, penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance), serta pengukuran dampak sosial dan lingkungan.

C. KONDISI KEUANGAN DAN KAPASITAS TEKNIS

Secara umum, kondisi keuangan BPRS Bangka Belitung menunjukkan kinerja yang stabil dengan tingkat profitabilitas dan likuiditas yang sehat. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung implementasi RAKB yang diarahkan secara bertahap dan proporsional, dengan fokus pada :

1. Pembiayaan kepada sektor UMKM dan usaha mikro produktif.
2. Penerapan efisiensi operasional untuk menghemat sumber daya (paperless office, hemat energi).
3. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital untuk memberikan informasi produk dan layanan kepada masyarakat (informasi dan edukasi)
4. Kapasitas teknis diarahkan untuk memperkuat sistem pemantauan data sosial dan lingkungan dari portofolio pembiayaan serta mengembangkan sistem pelaporan RAKB internal secara terintegrasi.

D. KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

BPRS telah membangun dan akan memperluas kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain :

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama dalam program pemberdayaan ekonomi mikro dan UMKM.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah dalam mendukung usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Lembaga pendidikan dan pesantren seperti Yayasan Bahrul Ulum, Universitas Muhamadiyah Bangka Belitung, IAIN SAS Babel, serta Sekolah Dasar Negeri maupun swasta sepropinsi Bangka Belitung untuk penguatan literasi keuangan syariah
4. Lembaga keuangan dan asosiasi perbankan syariah (HIMBARSI), untuk berbagi praktik terbaik (best practices) keuangan berkelanjutan.



E. STRATEGI KOMUNIKASI

Komunikasi yang efektif menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan RAKB yang meliputi :

1. Komunikasi Internal
 - a. Sosialisasi kebijakan dan tujuan RAKB kepada seluruh pegawai melalui rapat koordinasi, pelatihan, dan media internal (intranet, buletin).
 - b. Integrasi nilai keberlanjutan dalam budaya kerja dan sistem penilaian kinerja pegawai.
2. Komunikasi Eksternal
 - a. Penyampaian informasi kepada nasabah, masyarakat, dan regulator melalui website, laporan tahunan, media sosial, dan publikasi kegiatan.
 - b. Pelaporan keuangan berkelanjutan kepada OJK secara transparan sesuai ketentuan.
 - c. Edukasi publik terkait produk dan layanan syariah yang mendukung prinsip keberlanjutan.

F. SISTEM MONITORING, EVALUASI, DAN MITIGASI

BPRS Bangka Belitung telah menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko secara berlapis (*three lines of defense*). Dalam kaitannya dengan RAKB :

1. Satker Kepatuhan & Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan monitoring atas penerapan prinsip keberlanjutan pada setiap aktivitas bisnis.
2. SKAI (Audit Internal) melakukan evaluasi independen terhadap pelaksanaan RAKB dan memastikan efektivitas pengendalian risiko sosial serta lingkungan.
3. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi periodik atas laporan kinerja dan pencapaian program RAKB.

Selain itu, mitigasi risiko dilakukan melalui penerapan kebijakan kehati-hatian, penyusunan SOP berbasis ESG, dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sosial-lingkungan dari portofolio pembiayaan.



G. KEBIJAKAN PEMERINTAH

RAKB BPRS Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan arah regulasi pemerintah yang mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di sektor keuangan. Beberapa kebijakan yang menjadi acuan antara lain :

1. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
2. Rencana Pemerintah daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 yaitu Penguatan Inovasi Menuju Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah Secara Berkelanjutan yang mencakup penyiapan ekosistem inovasi, penciptaan nilai tambah, dan keberlanjutan di sektor-sektor unggulan

Seluruh kebijakan tersebut menjadi dasar dalam perumusan arah strategis RAKB agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan kebijakan regulator.

H. PENDEKATAN ANALISIS FAKTOR PENENTU

Adapun faktor dari penentu pembuatan RAKB ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity and Threats) dalam menganalisa potensi yang dimiliki oleh BPRS Bangka Belitung.

Kekuatan (Strengths)

- Memiliki ketersediaan layanan yang cepat
- Demografi karyawan yang didominasi oleh usia produktif sehingga memiliki semangat untuk memajukan Bank;
- Memiliki basis nasabah yang loyal dan sudah lama menjalin hubungan usaha dengan bank

Kelemahan (Weakness)

- Kualitas SDM yang perlu terus ditingkatkan
- Produk dan layanan masih terbatas;
- Sistem dan prosedur serta pedoman operasional masih dalam proses penyempurnaan;



Peluang (Opportunities)

- Sinergi dengan mitra strategis perusahaan
- Pertumbuhan UMKM yang baru di sekitar perkantoran
- Kebijakan pemerintah yang fokus pada tujuan Sustainable Development Goals;

Ancaman (Threats)

- Ketidakpedulian masyarakat yang masih kurang terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- Penggunaan kebutuhan dasar yang menggunakan bahan tidak ramah bagi kesehatan dan lingkungan;
- Ekosistem ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung bisnis keuangan yang berkelanjutan.

BAB IV

PRIORITAS DAN URAIAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. DASAR PEMIKIRIAN

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPRS Bangka Belitung didasari oleh komitmen untuk mewujudkan visi menjadi “*Bank Daerah Dambaan Masyarakat Negeri Serumpun Sebalai yang terpercaya, sehat, dan menguntungkan*”.

Dalam konteks keberlanjutan, visi tersebut diterjemahkan menjadi upaya Bank dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan sesuai prinsip syariah.

Dasar pemikiran utama RAKB adalah :

1. Bahwa kegiatan ekonomi dan pembiayaan harus membawa kemaslahatan sosial bagi masyarakat sekitar.
2. Bahwa pertumbuhan bisnis yang sehat harus diiringi dengan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab.
3. Bahwa BPRS Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi daerah, terutama bagi UMKM, usaha mikro, dan sektor sosial keagamaan.
4. Bahwa keuangan berkelanjutan bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan strategi bisnis jangka panjang yang memperkuat reputasi dan daya saing bank.

Oleh karena itu, program RAKB disusun untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat terintegrasi dalam seluruh kegiatan BPRS Bangka Belitung, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga pelaporan dampak sosial dan lingkungan.

B. KEGIATAN

Kegiatan RAKB tahun 2026 difokuskan pada inisiatif yang relevan dengan kapasitas BPRS Bangka Belitung serta memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara nyata.

No	Nama Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Bagian/Divisi Penanggung Jawab
1	Penyusunan SPO Berkelanjutan ke dalam Kebijakan Internal Bank	Jan 2026	Des 2026	SDI, Marketing, Kepatuhan & Manajemen Risiko, Operasional	Satker Kepatuhan & Manajemen Risiko
2	Pelatihan internal dan sosialisasi konsep keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai	Jan 2026	Nov 2026	Anggaran pelatihan, narasumber, modul pelatihan	Divisi SDI & Personalia
3	Program Literasi Keuangan Syariah dan Keberlanjutan bagi Pelajar dan UMKM	Jan 2026	Des 2026	Anggaran edukasi, media promosi, kerja sama sekolah	Divisi Marketing, Satker Kepatuhan
4	Penguatan data dan sistem pelaporan keuangan berkelanjutan	Mar 2026	Des 2026	Dukungan IT, pelatihan sistem pelaporan, perangkat lunak	Satker IT & Satker Kepatuhan
5	Pengembangan produk pembiayaan sosial dan ramah lingkungan (mis. pembiayaan UMKM hijau)	Apr 2026	Des 2026	Kajian produk, dukungan SDM pembiayaan, dana promosi	Divisi Marketing
6	Implementasi efisiensi operasional ramah lingkungan (paperless office dan hemat energi)	Jan 2026	Des 2026	Infrastruktur IT, pelatihan internal, biaya infrastruktur	Divisi Operasional & Satker IT
7	Kolaborasi dengan Pemda dan lembaga sosial untuk program ekonomi berkelanjutan	Jan 2026	Des 2026	Dana CSR/kemitraan, tim koordinasi eksternal	Direksi & Divisi Marketing
8	Peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan (ESG Risk)	Jun 2026	Des 2026	Anggaran pelatihan, narasumber eksternal	Satker Kepatuhan & Manajemen Risiko



No	Nama Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Bagian/Divisi Penanggung Jawab
9	Penguatan peran SKAI dalam evaluasi efektivitas pelaksanaan RAKB	Jan 2026	Des 2026	SDM audit internal, anggaran audit tematik	Satker Audit Internal (SKAI)
10	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi RAKB berbasis data digital	Jan 2026	Des 2026	Sistem informasi, perangkat lunak, SDM IT	Satker IT & Kepatuhan

C. SUMBER DAYA

Pelaksanaan RAKB tahun 2026 memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi manusia, keuangan, maupun teknologi.

1. Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan internal dan eksternal mengenai sustainable finance, manajemen risiko sosial-lingkungan, dan ESG.

SDM yang terlibat meliputi Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko, SKAI, dan Divisi SDI.

2. Sumber Daya Keuangan.

Pendanaan RAKB bersumber dari anggaran tahunan BPRS Bangka Belitung, dengan fokus pada efisiensi operasional dan realokasi biaya untuk program berkelanjutan (literasi, digitalisasi, pembiayaan sosial).

3. Sumber Daya Teknologi.

Penguatan sistem informasi untuk mendukung pelaporan RAKB dan manajemen data sosial-lingkungan dari kegiatan pembiayaan.

4. Sumber Daya Eksternal.

Pemanfaatan dukungan dan kemitraan dari pemerintah daerah, OJK, lembaga pendidikan, dan asosiasi perbankan syariah dalam bentuk pendampingan, pelatihan, atau akses program bantuan teknis.



D. SISTEM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

Evaluasi pelaksanaan RAKB dilakukan secara berkala dan terstruktur, melibatkan seluruh lapisan manajemen mencakup :

1. Monitoring Internal

Setiap program RAKB dipantau oleh satuan kerja pelaksana, dengan pelaporan berkala kepada Direksi dan Satuan Kepatuhan.

2. Evaluasi Periodik

Evaluasi capaian dilakukan setiap semester melalui rapat manajemen untuk menilai progres, hambatan, dan perbaikan program.

3. Audit Internal (SKAI)

Melakukan penilaian independen terhadap efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan RAKB.

4. Pelaporan kepada OJK

Hasil implementasi RAKB dilaporkan melalui mekanisme pelaporan berkelanjutan sesuai ketentuan POJK No. 51/2017.

Selain itu, indikator kinerja utama (Key Performance Indicators / KPI) RAKB akan mencakup aspek :

1. Jumlah pembiayaan berkelanjutan (UMKM, sosial, ramah lingkungan).
2. Program literasi keuangan dan inklusi.
3. Efisiensi operasional dan pengurangan dampak lingkungan.
4. Penguatan tata kelola dan kepatuhan ESG.

E. TANTANGAN DAN RENCANA KE DEPAN

Tantangan yang Dihadapi :

1. Pemahaman SDM terhadap konsep keuangan berkelanjutan masih terbatas.
2. Keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi dalam mengembangkan sistem dan produk berorientasi ESG.



3. Belum optimalnya integrasi RAKB dalam Rencana Bisnis Bank dan sistem pelaporan keuangan.
4. Kurangnya data dan indikator dampak sosial-lingkungan yang terukur pada portofolio pembiayaan.

Rencana Ke Depan :

1. Menyusun peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan BPRS Bangka Belitung 5 tahun ke depan yang selaras dengan strategi bisnis.
2. Melakukan pelatihan berjenjang bagi SDM tentang keuangan berkelanjutan dan risiko ESG.
3. Mengembangkan produk inovatif berbasis syariah dan keberlanjutan, seperti pembiayaan energi terbarukan skala mikro atau program sosial kemitraan.
4. Memperkuat kolaborasi eksternal dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan institusi keuangan lainnya.
5. Membangun sistem pelaporan digital yang mendukung monitoring dan evaluasi RAKB secara efisien.



BAB V

TINDAK LANJUT

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. TUJUAN TINDAK LANJUT

Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif yang telah direncanakan dapat dijalankan secara berkesinambungan, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, tindak lanjut ini menjadi sarana untuk melakukan continuous improvement atas kelemahan, hambatan, dan hasil evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya.

Secara khusus, tujuan tindak lanjut RAKB adalah :

1. Menjamin keberlanjutan implementasi prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan operasional dan bisnis BPRS Bangka Belitung
2. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi RAKB dengan langkah perbaikan yang konkret.
3. Mengintegrasikan hasil pelaksanaan RAKB ke dalam kebijakan, prosedur, dan Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan RAKB secara berkala kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

B. MEKANISME PELAPORAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan RAKB, BPRS Bangka Belitung menerapkan mekanisme pelaporan dan evaluasi sebagai berikut :

1. Pelaporan Internal

Setiap satuan kerja pelaksana menyampaikan laporan perkembangan program RAKB kepada Direksi



2. Evaluasi Manajemen

Direksi bersama Satuan Kepatuhan melakukan evaluasi semesteran terhadap realisasi program, capaian, serta perbaikan yang diperlukan.

3. Audit dan Review SKAI

SKAI melakukan audit tematik terhadap implementasi RAKB untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas kebijakan.

4. Pelaporan ke OJK

Hasil pelaksanaan RAKB dilaporkan kepada OJK melalui mekanisme pelaporan berkelanjutan sesuai POJK No.51/POJK.03/2017.

C. ARAH PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

Sebagai bagian dari roadmap keberlanjutan, arah pengembangan tindak lanjut RAKB BPRS Bangka Belitung mencakup :

1. Integrasi penuh prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam seluruh kebijakan dan proses bisnis.
2. Pengembangan produk dan layanan berkelanjutan yang lebih inovatif, seperti pembiayaan hijau UMKM, dan tabungan sosial.
3. Peningkatan sistem pelaporan berbasis data (data-driven reporting) untuk mendukung akurasi pengukuran dampak sosial-lingkungan.
4. Peningkatan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan OJK, asosiasi BPRS, dan lembaga riset daerah, guna memperkuat praktik keuangan berkelanjutan secara kolektif.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini merupakan wujud nyata komitmen BPRS Bangka Belitung dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sesuai prinsip syariah.

Melalui penyusunan RAKB ini, BPRS Bangka Belitung menegaskan bahwa keberlanjutan bukan hanya sekadar kewajiban regulasi berdasarkan POJK No.51/POJK.03/2017, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang Bank dalam memperkuat daya saing, reputasi, dan tanggung jawab sosial lingkungan.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi BPRS Bangka Belitung, kondisi organisasi, kapasitas keuangan, serta faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terintegrasi dalam seluruh lini bisnis Bank.

B. KOMITMEN PELAKSANAAN

Manajemen BPRS Bangka Belitung berkomitmen untuk :

1. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam RAKB secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.
3. Melaporkan perkembangan dan hasil implementasi RAKB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.



4. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk Direksi, Satuan Kepatuhan, SKAI, serta seluruh divisi pendukung, agar pelaksanaan RAKB menjadi bagian integral dari budaya organisasi.
5. Mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta komunitas sosial dalam memperluas dampak positif keuangan berkelanjutan di daerah.

C. PENUTUP

Dengan tersusunnya dokumen RAKB ini, BPRS Bangka Belitung menyatakan kesiapan untuk melangkah menuju arah bisnis yang lebih berkelanjutan, berintegritas, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, serta terus melakukan penyesuaian dan pengembangan terhadap RAKB sesuai dinamika bisnis, perkembangan regulasi, serta tuntutan keberlanjutan yang semakin meningkat.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam dan kesejahteraan umat, BPRS Bangka Belitung bertekad menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang, menuju terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera di Negeri Serumpun Sebalai.